

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI: APLIKASI TPB
(Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

DWI AGUSTIANTONO

NIM. C2C008179

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dwi Agustiantono
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008179
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI: APLIKASI TPB
(Studi Empiris WPOP di Kabupaten
Pati)**
Dosen Pembimbing : Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 18 Maret 2012

Dosen Pembimbing,

(Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 196708141998022001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dwi Agustiantono, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 18 Maret 2012

Yang membuat pernyataan,

(Dwi Agustiantono)

NIM: C2C008179

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bertindaklah sewajarnya, jangan terlalu berlebihan atau memaksakan kehendak yang tak mungkin”

“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi”

“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri”

“Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri” (*Ibu Kartini*)

“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri” (*Benyamin Franklin*)

SKRIPSI INI SPESIAL KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- ❖ Orang tua tercinta
- ❖ Kakakku
- ❖ Tataa
- ❖ Keluarga, saudara dan sahabat
- ❖ Almamaterku
- ❖ Masyarakat Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di kabupaten Pati. Variabel eksogen yang dilibatkan adalah sikap terhadap peraturan perpajakan, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, persepsi kondisi keuangan pribadi, persepsi fasilitas tempat kerja, dan persepsi iklim keorganisasian. Sedangkan variabel endogen yang digunakan dalam penelitian yaitu niat wajib pajak orang pribadi, serta ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menggunakan responden wajib pajak orang pribadi di kabupaten Pati. Kemudian data dikumpulkan dengan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang diolah sebanyak 76 responden. Penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modelling* dengan software SmartPLS 2.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap peraturan perpajakan, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral mempengaruhi niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sedangkan norma subyektif tidak mempengaruhi niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan. Kontrol berperilaku yang dipersepsikan, niat, kondisi keuangan pribadi serta iklim keorganisasian mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan fasilitas tempat kerja tidak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci : sikap terhadap peraturan perpajakan, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, niat wajib pajak orang pribadi, persepsi kondisi keuangan pribadi, persepsi fasilitas tempat kerja, persepsi iklim keorganisasian, ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence taxpayer non compliance behavior, especially in Pati town. exogenous variables used in this study are attitude toward taxation rules, subjective norm, moral obligation, perceived behavioral control, perceived individual financial condition, perceived office facilities, and perceived organizational climate. Whereas endogenous variables are taxpayer intention and taxpayer non compliance.

Respondents of this research are taxpayer in Pati. Next step, data collected by purposive sampling method. Number of samples in this research is 76 respondents. This study used Structural Equation Modelling with SmartPLS 2.0 software.

The study results indicate that attitude toward taxation rule, perceived behavioral control, moral obligation influenced taxpayer intention to uncomply of taxation rules. Whereas subjective norm didn't influence taxpayer intention to uncomply of taxation rules. Perceived behavioral control, taxpayer intention, perceived individual financial condition, perceived organizational climate influenced taxpayer non compliance. Whereas, perceived office facilities didn't influence taxpayer non compliance.

Key Word : attitude toward taxation rule, subjective norm, perceived behavioral control, moral obligation, taxpayer intention, perceived individual financial condition, perceived office facilities, perceived organizational climate, taxpayer non compliance

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: APLIKASI TPB (STUDI EMPIRIS WPOP DI KABUPATEN PATI)”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis dengan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah swt. yang selalu member rahmat dan hidayahnya.
2. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, MSi., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan banyak saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang saya harapkan serta merupakan *masterpiece* awal penelitian saya pribadi.
4. Herry Laksito, S.E., M.Adv., Acc., Akt. selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam kelancaran kegiatan akademis.
5. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung.
6. Seluruh staf administrasi, akademik dan bagian SIMAWEB di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan

kelancaran proses administrasi maupun akademik selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tua penulis (Suhartono, S.H. dan Eko Siwi Betty Retnowati) yang tidak pernah berhenti selalu memberikan motivasi dan segala biaya untuk penyelesaian kuliah maupun penyusunan skripsi ini. Saya harap kelak saya akan dapat membalas semua pemberian ayah dan mama. Terima kasih untuk semuanya.
8. Kakak penulis (Eka Handika Septistalia Anggraeni) yang masih melakukan studi kedokterannya, namun selalu membantu di saat penulis sedang kebingungan atas penelitian yang dilakukan. Ayo mbak, kita lulus tahun ini!
9. Tataa (Irma Puasanti), mahasiswi S1 Keperawatan di Stikes Harapan Bangsa yang selalu mengingatkan penulis untuk melanjutkan pengerjaan skripsinya dengan semboyan “ Sesuatu yang dikerjakan setengah-setengah, hasilnya juga akan setengah-setengah juga”. Terima kasih taa, akan selalu kuingat nasihatmu.
10. Mbah kakung, embah uti, om, tante, semua adik sepupu yang selalu memberikan kebahagiaan dan membuat suasana hati penulis kembali bersemangat.
11. Teman-teman “*Dream Team*” (Gagat Tio, Afiq) yang bisa dikatakan kelompok seumur hidup. Terima kasih teman, penulis bangga bisa menjadi kelompok kalian.
12. Septian Ananggadipa yang menjadi naungan konsultasi oleh penulis
13. Semua teman-teman kelas A angkatan 2008 dimulai dari Adul, Jo, Daniel, Reza, Fadil, Al, Rahman, Haris, Bambang, Tiar, Roni, Bram, Evan, Angga, Fajar, serta teman-teman cewek kelas A.

14. Teman-teman Tim II KKN Desa Banyubiru 2011 (Maris, Ninta, Aji, Ebi, Uus, Iwan, Unik, Nadia, dan Mbak Linda). Terimakasih atas kebersamaan dan semangatnya.
15. Anggota Tiger Semarang Club (Zoel, Odod, Mas Robi, Guntoro, dan semuanya). Maaf bro, penulis ga pernah kopdar karena sibuk skripsi. Terima kasih atas pengertiannya.
16. Teman-teman operator @n.net (Mas Dian, Mbak Lutfi, Mbak Azis, Mas Danu, Mas khubab, Tito, Barta, Dodo, Martha,) yang selalu menggantikan *shift* penulis saat diperlukan.
17. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih semuanya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 18 Maret 2012

Penulis

Dwi Agustiantono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	13
2.1.1 Pengertian Pajak.....	13
2.1.2 Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan.....	15
2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.1.4 Perilaku dan Sistem Informasi Keperilakuan.....	18
2.1.5 Theory of Planned Behavior.....	19
2.1.6 Sikap.....	22
2.1.7 Norma Subyektif.....	23
2.1.8 Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan.....	24
2.1.9 Kewajiban Moral.....	25
2.1.10 Niat Berperilaku.....	26
2.1.11 Kondisi Keuangan Pribadi.....	27
2.1.12 Fasilitas Tempat Kerja.....	28
2.1.13 Iklim Keorganisasian.....	29
2.1.14 Penelitian Terdahulu.....	30

2.2 Kerangka Pemikiran.....	36
2.3 Hipotesis Penelitian.....	40
2.3.1 Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Niat Berperilaku	40
2.3.2 Pengaruh Norma Subyektif terhadap Niat Berperilaku	41
2.3.3 Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Niat Berperilaku.....	41
2.3.4 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Niat.....	42
2.3.5 Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Perilaku	43
2.3.6 Pengaruh Niat Berperilaku terhadap Perilaku	44
2.3.7 Pengaruh Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi terhadap Kepatuhan Pajak.....	44
2.3.8 Pengaruh Persepsi Fasilitas Perusahaan terhadap Kepatuhan Pajak	45
2.3.9 Pengaruh Persepsi Iklim Keorganisasian terhadap Perilaku.....	45
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 47
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	47
3.1.1 Sikap terhadap Ketidakpatuhan Pajak	48
3.1.2 Norma Subyektif.....	49
3.1.3 Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan.....	49
3.1.4 Kewajiban Moral	50
3.1.5 Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Berperilaku Tidak Patuh.....	50
3.1.6 Persepsi tentang Kondisi Keuangan Pribadi.....	50
3.1.7 Persepsi tentang Fasilitas Perusahaan	51
3.1.8 Persepsi tentang Iklim Keorganisasian	51
3.1.9 Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	51
3.2 Populasi dan Sampel	52
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	53
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	54
3.5 Metode Analisis Data.....	54
3.5.1 Inner Model.....	55
3.5.2 Outer Model.....	56
3.5.3 Weight Relation	57
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 58
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	58
4.1.1 Deskripsi Responden	58
4.1.1.1 Identifikasi Responden Berdasarkan Umur	59

4.1.1.2	Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
4.1.1.3	Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	60
4.1.1.4	Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Informal	60
4.1.1.5	Identifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	60
4.1.1.6	Identifikasi Responden Berdasarkan Pengisian SPT	61
4.1.1.7	Identifikasi Responden Berdasarkan Tugas Utama.....	61
4.2	Analisis Data	62
4.2.1	Analisis Data.....	62
4.2.2	Evaluasi Measurement (Outer) Model.....	64
4.2.2.1	Convergent validity	64
4.2.2.2	Discriminant Validity	66
4.2.2.3	Composite Realibility dan Cronbach Alpha.....	70
4.2.3	Pengujian Model Struktural (Inner Model)	72
4.2.3.1	R Square	72
4.2.3.2	Path Coefficients	73
4.3	Interpretasi Hasil	77
4.3.1	Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Niat Berperilaku	77
4.3.2	Pengaruh Norma Subyektif terhadap Niat Berperilaku	77
4.3.3	Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Niat Berperilaku.....	78
4.3.4	Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Niat.....	78
4.3.5	Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Perilaku	78
4.3.6	Pengaruh Niat Berperilaku terhadap Perilaku	78
4.3.7	Pengaruh Kondisi Keuangan Pribadi terhadap Kepatuhan Pajak	78
4.3.8	Pengaruh Fasilitas Tempat Kerja terhadap Kepatuhan Pajak	79
4.3.9	Pengaruh Iklim Keorganisasian terhadap Perilaku	79
BAB V PENUTUP.....		80
5.1	Simpulan	80
5.2	Keterbatasan	81
5.3	Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Hasil Pembagian Kuesioner	58
Tabel 4.2 Umur	59
Tabel 4.3 Jenis Kelamin	59
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir	60
Tabel 4.5 Pendidikan Formal	60
Tabel 4.6 Lama Bekerja	61
Tabel 4.7 Pengisian SPT	61
Tabel 4.8 Tugas Utama	62
Tabel 4.9 OuterLoadings (Mean, STDEV, T-Values)	64
Tabel 4.10 Cross Loading	66
Tabel 4.11 Composite Realibility	71
Tabel 4.12 Cronbach Alpha	71
Tabel 4.13 R Square	72
Tabel 4.14 Path Coefficients	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Teoritis	39
Gambar 4.1 Output Grafik SmartPLS 2.0 M3	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Surat Izin Penelitian.....

Lampiran B Exploratory Test.....

Lampiran C Kuesioner

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan pendahuluan penelitian, yaitu latar belakang masalah yang berisi permasalahan penelitian sehingga perlu diteliti, rumusan masalah tentang keadaan atau konsep penelitian yang membutuhkan pemecahan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai menerapkan reformasi di bidang perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat itulah, negara Indonesia memulai menganut *self assessment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu negara apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang ada pada diri setiap masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004 dalam Mutikasari, 2007). Rasio kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga April 2010 tercatat sebesar 54,84 % atau sejumlah 7,73 juta dari wajib pajak yang ada di Indonesia (Tambunan, 2010). Sedangkan jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib pajak terdaftar yang menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Jumlah penerimaan SPT ini mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya yang sekitar 5.413.114 atau sebesar 52,61 % dengan jumlah WP terdaftar sebanyak 10.289.590 pada tahun 2009 (Harian Neraca, 2010).

Pemerintah Indonesia mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang merupakan sebuah sistem untuk menghitung jumlah iuran pajak berdasarkan penghitungan oleh instansi terkait tempat wajib pajak bekerja atau biasa disebut dengan istilah fiskus (pemungut pajak). Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat di Indonesia. Tidak hanya itu, reformasi di bidang perpajakan ini juga bertujuan untuk menegakkan hukum di sektor perpajakan.

Sistem penghitungan sendiri ini juga merupakan bentuk dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari individu-individu yang tergolong dalam Warga Negara Indonesia dan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selanjutnya akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri jumlah nominal yang akan dibayar, menyetorkan hasil penghitungan tersebut, serta melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dibagikan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak). Oleh karena itu, pelaksanaan *self assessment system* sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak (Hutagaol, 2005: 24-25 dalam Pongtuloran, 2010).

Sistem penghitungan sendiri (*self assessment*) memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik

akibat dari kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi ketidakefektifan penerapan sistem *self assessment*, dan agar pelaksanaan kewajiban wajib pajak dapat dilaksanakan secara baik dan benar, harus diimbangi dengan memberikan penyuluhan pajak (*tax dissemination*), pelayanan perpajakan (*tax service*) dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Apabila ketiga fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban dan haknya di sektor perpajakan akan meningkat. Pada akhirnya akan meningkatkan *tax ratio* dan sekaligus penerimaan pajak. Namun pada kenyataan yang ada sekarang ini, negara Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Fakta tersebut terbukti setelah diperoleh data yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio* belum dapat dimaksimalkan (Pongtuloran, 2010).

Sesuai pernyataan Sommerfeld, *et al* (1994) dalam Santoso (2008) bahwa *tax gap* merupakan besarnya sejumlah penerimaan pajak yang hilang karena adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak, yang bentuknya berupa penghasilan yang tidak dilaporkan (*underreported income*) maupun pengurang penghasilan yang lebih dilaporkan (*overstated deductions*). Menurut James (2003) dalam Pongtuloran (2010), besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*), semakin besar *tax gap* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin buruk, sedangkan semakin kecil *tax gap* menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak semakin baik.. Hingga sekarang, masih terdapat selisih yang cukup besar antara penerimaan pajak dengan yang seharusnya diterima (*tax gap*) (Gunadi, 2004). Darmin Nasution (2010) pernah menyebutkan bahwa *tax gap* bisa mencapai hingga Rp 300 Triliun per tahun. Angka itu berarti sekitar 40 persen dari target penerimaan pajak 2010 sebesar 733 Triliun (Harian Neraca, 2010).

Kanwil DJP Jateng I mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari wajib pajak orang pribadi pada tahun 2010 baru mencapai Rp 110, 76 milyar atau sekitar 61,24% dari target tahun tersebut (seputarsolo.com, 4 April 2012). Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa *tax gap* untuk wilayah Jawa Tengah yang berasal dari WPOP sekitar 38,76%.

Untuk memperkecil *tax gap* masih ada beberapa kendala yang dihadapi. (Dwijogeastedy, 2010) mengungkapkan bahwa belum ada kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin dengan Undang-Undang Perpajakan. Selain itu terdapat pula adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak. Oleh karena itu, masyarakat pun mencoba-coba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya. Sedangkan transparansi penggunaan uang hasil pajak belum terlaksana dikarenakan pajak itu bukan hanya memungut saja dari masyarakat, tapi juga perlu ada penjelasan digunakan untuk apa saja uang hasil pajak tersebut. Apakah benar semua alokasi dana yang bersumber dari kontribusi pajak digunakan secara tepat dalam rangka mencapai pembangunan nasional yang adil dan merata untuk masyarakat Indonesia.

Beberapa peneliti terdahulu menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behaviour (TPB)* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak dari wajib pajak. Model TPB menguraikan penjelasan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Harinurdin (2009) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan dengan responden perusahaan besar yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar karena pada umumnya perusahaan besar memiliki sistem informasi akuntansi formal (Bouwens dan Abernethy, 2000; Siahaan, 2005 dalam Harinurdin, 2009). Hasil penelitian menunjukkan persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak. Namun, kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat. Kondisi keuangan, fasilitas perusahaan, iklim organisasi, dan niat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian lain dilakukan oleh Bobek, dkk (2007) dengan menerapkan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* mengenai alasan perilaku para wajib pajak yang lebih suka menggunakan *refund* (kelebihan pajak). Yang dimaksud dengan *refund* adalah jumlah pajak yang disetorkan oleh wajib pajak lebih besar daripada jumlah yang tertera di SPT. Responden adalah para siswa yang diminta untuk membuatkan email orang tua masing-masing dengan tujuan agar mereka dapat mengisikan data perpajakan orang tua yang bersangkutan. Hipotesis yang diterapkan ada 3 dengan variabel independen yaitu sikap, norma subyektif, dan persepsi wajib pajak tentang kemampuan mereka untuk mengendalikan pembayaran mereka. Sedangkan variabel dependen adalah keputusan pembayaran

sementara wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayar pajak rela mengorbankan potensi pendapatan investasi untuk mendapatkan manfaat emosional dari penerimaan cek pengembalian dana serta untuk menghindari kekhawatiran dan ketidakpastian tagihan pajak yang tak terduga. Dengan demikian, *tax professional* dan pembuat kebijakan memiliki kesempatan untuk menginformasikan pembayar pajak untuk mendapatkan hasil yang sama tanpa mengurangi manfaat keuangan dari pembayaran pajak yang dilakukan.

Bobek dan Hatfield (2003) melakukan penelitian mengenai TPB dan peran kewajiban moral dalam kepatuhan pajak. Di dalam penelitian ini wajib pajak yang dijadikan penelitian adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP). Pada hipotesis pertamanya, disebutkan bahwa variabel yang terkandung di dalam TPB yaitu sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norms*), dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived control behavior*) berhubungan positif dengan perilaku tidak patuh. Hipotesis kedua menyebutkan kewajiban moral mempengaruhi perilaku tidak patuh. Sedangkan hipotesis ketiga menyebutkan bahwa kewajiban moral mempengaruhi variabel yang terkandung di dalam TPB. Sampel penelitian terbagi ke dalam tiga sumber, yaitu, mahasiswa universitas, para orang tua dari siswa Sekolah Dasar, serta penduduk Florida dan Georgia yang dipilih secara acak. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa sikap (*attitude*) dan norma subyektif (*subjective norms*) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Sedangkan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived control behavior*) tidak signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Kewajiban moral menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap perilaku

tidak patuh. Untuk hasil dari hipotesis terakhir menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengaruh kewajiban moral terhadap variabel-variabel di dalam TPB.

Mutikasari (2007) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang subjeknya adalah perusahaan industri pengolahan kelas menengah dan besar karena pada umumnya perusahaan telah menggunakan sistem informasi formal (Bouwens dan Abernethy, 2000). Responden untuk penelitian adalah *tax professional* yang bekerja di perusahaan bersangkutan. Teori yang digunakan sama seperti dengan para pendahulu yaitu *Theory of Planned Behaviour (TPB)* dengan variabel independen sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) berpengaruh terhadap niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh. Peneliti menambahkan beberapa faktor lain yang dijadikan sebagai variabel independen selain yang terdapat di model TPB. Variabel independen yang dimaksud antara lain niat, kewajiban moral, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan, dan iklim organisasi perusahaan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan. Hasil dari penelitian adalah faktor-faktor tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku serta perilaku responden itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menguji kembali pengaruh dari variabel-variabel pembentuk niat dan perilaku dari wajib pajak berdasarkan model TPB, yaitu sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) ditambahkan beberapa faktor lain, diantaranya kewajiban moral, persepsi kondisi keuangan

pribadi, persepsi fasilitas perusahaan, dan persepsi iklim organisasi karena peneliti ingin memberikan bukti empiris faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di kabupaten Pati. Kepala Keluarga non keluarga miskin di kabupaten Pati, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Mencapai 209 ribu lebih (Pambudi, 2011). Namun mereka yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru seper enamnya. Sehingga terdapat potensi wajib pajak di kabupaten Pati belum ber NPWP dan membayar pajak. Kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan diperlukan karena merupakan sarana untuk mewujudkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara dimana uang dari hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Pati (Tasiman, 2010).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan WPOP dengan harapan pemerintah dapat mengatasi APBN agar dapat meningkat sesuai dengan jumlah yang seharusnya tanpa terjadi adanya *tax gap* yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi: aplikasi TPB (studi empiris WPOP di kabupaten Pati).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan mengenai keadaan, fenomena, maupun konsep yang memerlukan pemecahan atau solusi melalui suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, masalah utama yang dihadapi yaitu mengenai ketidakpatuhan Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Pati. Tahun lalu pencapaian

pajak di Kabupaten Pati senilai lebih dari Rp. 299 milyar. Pencapaian itu lebih tinggi dibanding tahun 2010 yang hanya sekitar Rp. 266 milyar, atau meningkat 112%. Pencapaian itu erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pati (Pambudi, 2012). Untuk tahun 2012, pencapaian pajak KPP Pratama Pati ditargetkan Rp. 307 milyar. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang dapat dianalisis menggunakan teori TPB dengan variabel-variabel pembentuk niat dan perilaku dari wajib pajak berupa sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*), serta beberapa variabel prediktor lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan?
2. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan?
3. Apakah kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan?
4. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan?
5. Apakah kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi?

6. Apakah niat untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi?
7. Apakah persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi?
8. Apakah persepsi fasilitas tempat kerja berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi?
9. Apakah persepsi iklim keorganisasian berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Sedangkan pada bagian kegunaan penelitian akan dijelaskan kegunaan penelitian bagi akademisi dan pemerintah.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sikap terhadap peraturan perpajakan terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh norma subyektif terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.

3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.
4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kewajiban moral terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.
5. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh niat untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.
7. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh persepsi kondisi keuangan pribadi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.
8. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh persepsi fasilitas tempat kerja terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.
9. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh persepsi iklim keorganisasian terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan informasi untuk:

1. Bagi akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan untuk para pembaca bahwa perilaku itu dipegaruhi oleh bermacam-macam

hal disekitar kita dan tanpa disadari faktor-faktor tersebut dapat menjadikan kita sebagai individu yang berkarakter. Melalui teori TPB, kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi niat berperilaku, yaitu sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan selanjutnya akan mempengaruhi perilaku. Niat juga dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel selain dari model TPB. Di sisi lain, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan umpan balik terhadap pemerintah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam hal penerapan *self assessment system*.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar, berupa teoritis maupun fakta, disertai dengan pengamatan yang menimbulkan minat dan perlu untuk dilakukan penelitian. Selain itu di dalam pendahuluan juga terdapat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab selanjutnya mengkaji teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Termasuk di dalamnya adalah menggunakan metode untuk menguji hipotesis, lalu memperoleh hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai landasan teori disertai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Di dalam landasan teori dijelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Kerangka pemikiran berisi uraian singkat tentang permasalahan yang diteliti. Sedangkan hipotesis adalah pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka.

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Pada bagian landasan teori akan dijelaskan mengenai beberapa teori yang menjelaskan variabel penelitian. Beberapa teori tersebut berkaitan dengan definisi maupun tata cara perpajakan, teori TPB, serta beberapa teori lain yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku. Selain itu juga akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. **Subyek pajak pribadi** yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. **Subyek pajak harta warisan belum dibagi** yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. **Subyek pajak badan** badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).
 - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
 - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

4. **Bentuk usaha tetap** yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Wajib Pajak Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak merupakan segala ketentuan yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Di dalam tata cara pemungutan pajak berisi stelsel pajak

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata

berdasar objek (penghasilan yang nyata), pemungutan baru dapat dilakukan di akhir tahun pajak, setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pada stelsel ini pajak dikenakan lebih realistis, tapi pengenaannya baru dapat dikenakan di kenakan di akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel Anggapan

Berdasar suatu anggapan yang diatur undang-undang. Misal, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah ditetapkan besarnya pajak terhutang untuk tahun pajak berjalan. Tapi sayangnya pajak yang dibayarkan tidak berdasar keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran Kombinasi antara Stelsel Nyata dan Stelsel Anggapan.

Pada awal tahun pajak dihitung berdasar satu tahun anggapan, lalu pada akhir tahun dilakukan penyesuaian menurut keadaan sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri:

- 1) wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) wajib pajak bersifat pasif
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri:

- 1) Wewenang menghitung besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
- 2) Wajib pajak bersifat aktif, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Sistem yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus, bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2.1.4 Perilaku dan Sistem Informasi Keperilakuan

Perilaku (*behavior*) adalah tindakan-tindakan (*actions*) atau reaksi-reaksi (*reactions*) dari suatu obyek atau organism. Perilaku dapat berupa sadar (*conscious*) atau tidak sadar (*unconscious*), terus terang (*overt*) atau diam-diam (*covert*), sukarela (*voluntary*) atau tidak sukarela (*involuntary*)(Jogiyanto, 2007).

Perilaku antara hewan dan manusia berbeda. Pada hewan, perilaku dikontrol oleh sistem endocrine (*endocrine system*) dan system syaraf (*nervous system*). Kerumitan perilaku dari organisme dihubungkan dengan kerumitan dari system sarafnya. Secara umum, organisme dengan sistem-sistem saraf yang kompleks mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk belajar respon-respon baru yang digunakan untuk menyesuaikan perilaku mereka. Sedangkan manusia dapat berupa perilaku yang umum (*common behavior*), tidak umum, dapat diterima atau tidak dapat diterima. Manusia mengevaluasi penerimaan dari perilaku dengan menggunakan suatu standar perbandingan yang disebut dengan norma-norma sosial (*social norms*) dan meregulasi perilaku dengan menggunakan kontrol sosial (*social control*).

Untuk memahami penentu-penentu perilaku, yang digunakan adalah teori keperilakuan (*behavioral theory*) yang sangat erat hubungannya dengan ilmu psikologi dimana ilmu ini merupakan bagian dari sains atas perilaku dan proses-proses mental yang mencoba mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan berbagai aspek dari perasaan, pikiran, persepsi, dan kegiatan.

Hasil dari penggabungan antara teori keperilakuan dengan penggunaan sistem teknologi informasi di organisasi menjadi dasar dari sistem informasi keperilakuan yang mempelajari bagaimana organisasi harus mengembangkan suatu sistem teknologi informasi untuk mengarahkan perilaku-perilaku (*behaviors*) dari individu-individu dalam melakukan interaksi dengan sistem teknologi informasi yang bersangkutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.5 Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) yang telah dikembangkan oleh Icek Ajzen (1988) merupakan pengembangan atas *theory of reasoned action* (TRA) yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu. Di dalam TPB ditambahkan sebuah variabel yang belum diterapkan pada TRA yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Secara eksplisit, TPB mengenal kemungkinan bahwa tidak semua perilaku dilakukan secara penuh dibawah kendali individu maupun kelompok, sehingga konsep kontrol perilaku yang dipersepsikan ditambahkan untuk mengatasi perilaku-perilaku semacam ini. Apabila semua perilaku dapat dikendalikan secara penuh oleh individu maupun kelompok, dimana kontrol perilaku (*behavioral control*) mendekati maksimum, maka TPB kembali menjadi TRA.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) didefinisikan oleh Ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007) sebagai kemudahan atau kesulitan yang dipersepsikan untuk melakukan perilaku (*“the perceived ease or difficulty of performing the behavior”*). Dalam konteks sistem teknologi

informasi, Taylor dan Todd (1995) dalam Jogiyanto (2007) mendefinisikan kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai persepsi dari konstruk-konstruk internal dan eksternal atas perilaku (*“perception of internal and external constructs of behavior”*). Kontrol perilaku yang dipersepsikan menjelaskan tentang pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan-halangan yang ada. Aturan umumnya adalah semakin menarik sikap dan norma subyektif terhadap suatu perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin kuat pula niat seseorang untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan.

Penting untuk diketahui bahwa TPB tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi.

Theory of planned behavior (TPB) menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga jenis kepercayaan-kepercayaan, diantaranya adalah:

1. Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan tentang kemungkinan akan terjadinya sebuah perilaku. Di dalam TRA, hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.

2. Kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Di dalam TRA, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.
3. Kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangki kinerja dari perilaku dan kekuatan atas persepsi dari faktor-faktor tersebut. Di dalam TRA hal ini belum ada, maka ditambahkan pada TPB dan disebut dengan *perceived behavioral control*.

Secara keseluruhan, kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*) dapat menciptakan suatu sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku, kepercayaan-kepercayaan normatif, menghasilkan tekanan sosial atau norma-norma subyektif, dan kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*) akan memberikan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Secara simultan, sikap (*attitude*) terhadap perilaku, norma-norma subyektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) akan menimbulkan niat perilaku (*behavioral intention*) yang selanjutnya akan mengakibatkan perilaku (*behavior*).

Di dalam model TPB terdapat delapan variabel yang saling berkaitan. Antara satu variabel memiliki hubungan lebih dari satu variabel lainnya. Untuk lebih jelasnya, teori ini terdapat dalam gambar di lampiran. Pada teori ini, sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) dipengaruhi oleh kepercayaan-

kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*). Untuk norma subyektif (*subjective norms*) dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*), sedangkan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*).

2.1.6. Sikap

Sikap (*attitude*) merupakan sebuah evaluasi kepercayaan (*belief*) atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Jogiyanto (2007) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak, dan lain sebagainya. Menurut Mutikasari (2007), sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek yang bersangkutan. Di dalam *Theory of planned of behavior*, sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavior beliefs*) dimana kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang dilakukan (Jogiyanto, 2007).

Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, dimana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan sifatnya statis atau sulit untuk berubah. Untuk merubah karakter sangat diperlukan usaha yang sangat keras

karena hal ini sudah dijadikan individu sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan karakter itu sendiri merupakan bawaan lahir. Sedangkan sikap yang melekat pada diri seseorang dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya. Apabila seorang individu berada pada situasi bergaul dengan orang lain yang sikapnya sangat berbeda dengannya dan hal ini dilakukan secara terus-menerus, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa individu tersebut secara otomatis akan merasakan bahwa sikapnya mulai berubah mengikuti lingkungan baik itu disadari maupun tidak disadari.

2.1.7 Norma Subyektif

Norma subyektif (*subjective norms*) adalah persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1988 dalam Mutikasari, 2007). Norma subyektif merupakan pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Apabila orang lain setuju pada perilaku yang ditunjukkan individu, maka perilaku ini akan dilakukan terus menerus karena individu merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Namun apabila perilaku yang ditunjukkan tidak diterima oleh orang lain, maka hal tersebut tidak akan diulangi lagi oleh individu. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa teman sejawat adalah salah satu faktor utama yang dapat memprediksi perilaku yang ditunjukkan wajib pajak.

Di dalam *Theory of planned of behavior*, norma subyektif (*subjective norms*) dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yaitu kepercayaan tentang harapan yang dimiliki oleh individu yang melakukan perilaku terhadap pandangan orang lain agar dapat menerima dan melakukan motivasi terhadap perilaku yang ditunjukkan.

2.1.8 Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) dalam konteks perpajakan adalah ukuran tingkatan kendali yang dimiliki oleh seseorang yang tergolong sebagai wajib pajak dalam menunjukkan perilaku tertentu, seperti melaporkan jumlah penghasilan yang sesungguhnya, melakukan kecurangan dengan mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengurangan dalam penghasilan, serta perilaku lainnya yang menampilkan adanya ketidakpatuhan pajak (Bobek dan Hatfield, 2003 dalam Mutikasari, 2007). Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan ini dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku dan perilaku wajib pajak.

Ajzen (2002) dalam Mutikasari (2007) mengatakan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) mempengaruhi niat. Hal ini berdasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi berupa motivasi terhadap orang tersebut. Maksudnya adalah niat akan terbentuk dengan sendirinya apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bobek dan Hatfield (2003) dalam Mutikasari (2007) bahwa

pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan tidak signifikan terhadap niat untuk berperilaku.

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dapat mempengaruhi perilaku baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung akan muncul apabila terdapat *actual control* yang berada di luar kehendak individu (Ajzen, 1988 dalam Mutikasari, 2007).

Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif dan semakin besar kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh seseorang, maka niat untuk memunculkan sebuah perilaku tertentu juga semakin besar. Sesuai dengan fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa niat itu akan diwujudkan apabila kesempatan itu muncul. Akan tetapi, perilaku yang ditunjukkan oleh individu dapat berbeda dengan niat individu apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk menampilkan perilaku sesuai dengan niat yang dimiliki oleh individu tersebut sehingga dapat mempengaruhi kontrol keperilakuan yang dipersepsikan secara tidak langsung. Di dalam TPB, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yaitu kepercayaan mengenai hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang ingin ditunjukkan oleh individu.

2.1.9 Kewajiban Moral

Selain sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang terkandung di dalam TPB, terdapat beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku. Kewajiban moral merupakan salah

satu faktor selain dari model TPB yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Ajzen (1991) dalam Mutikasari (2007) berpendapat, bahwa model TPB masih memungkinkan untuk ditambahi variabel prediktor lain, selain sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norms*), dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Kewajiban moral merupakan norma individu yang melekat pada diri seseorang, namun kemungkinan besar hal ini tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu ini tidak secara langsung dijelaskan pada bentuk TPB. Blanthorne (2000); Kaplan, Newbery & Reckers (1997); Hanno & Violette (1996) dalam Mutikasari (2007) telah membuktikan secara empiris, bahwa kewajiban moral berpengaruh secara negatif signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak.

2.1.10 Niat Berperilaku

Niat (*intention*) didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan suatu perilaku sesuai kehendak individu (Jogiyanto, 2007). Niat berhubungan dengan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan dan dapat diprediksi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Dalam kenyataan di lapangan, niat tidak selalu bersifat tetap atau statis. Niat dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendak dari individu yang bersangkutan seiring dengan berjalannya waktu. Semakin lebar rentang waktu, semakin besar juga terjadi perubahan dalam niat yang akan dialami. Begitu juga sebaliknya, apabila rentang waktu semakin kecil, dapat meminimalisir terjadinya perubahan atas niat.

Di dalam TPB, niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) *behavioral beliefs*, yang merupakan kepercayaan yang muncul dalam

diri individu atas hasil dari suatu perilaku dan evaluasi mengenai hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normative beliefs* yang merupakan kepercayaan yang muncul dalam diri individu tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yang merupakan kepercayaan atas semua hal yang dapat mendukung atau menghambat sebuah perilaku yang ditunjukkan (*control beliefs*) dan persepsinya mengenai seberapa besar hal-hal tersebut dapat mendukung ataupun menghambat perilaku yang ditampilkan (*perceived power*). Hambatan yang biasanya timbul pada saat perilaku tersebut ditunjukkan terkadang muncul dari dalam maupun dari luar individu (faktor lingkungan). Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif ataupun negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menghasilkan *perceived behavioral control* (Ajzen, 2002:2 dalam Mutikasari, 2007).

2.1.11 Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar

yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk.

Di dalam perusahaan, profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Slemlord, 1992; Bradley, 1994; dan Siahaan, 2005 dalam Mutikasari, 2007). Berdasarkan uraian tersebut, kondisi keuangan juga dapat berlaku di dalam individu dimana kondisi keuangan individu dapat dijadikan salah satu variabel prediktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk melaporkan pajaknya.

2.1.12 Persepsi Fasilitas Tempat Kerja

Fasilitas tempat kerja meliputi semua sumber daya yang terdapat dalam tempat kerja dan dapat mendukung kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, baik berupa infrastruktur maupun informasi yang relevan dan digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak Orang Pribadi diharapkan dapat memiliki kemampuan menyajikan informasi berkaitan dengan perpajakannya dengan pemberian fasilitas oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Fasilitas tempat kerja dapat mengurangi ketidakpastian bagi WPOP serta dapat menjamin, bahwa mereka memiliki semua data yang dibutuhkan untuk membuat suatu pelaporan yang dapat menginformasikan semuanya secara lengkap (*fully informed reporting decision*). Apabila terdapat suatu keadaan dimana WPOP memperoleh fasilitas yang memadai, maka ketidakpastian yang dihapapi

oleh WPOP hanya berhubungan dengan ketidakpastian yang ada di dalam peraturan perpajakan.

2.1.13 Persepsi Iklim Keorganisasian

Setiap perilaku yang ditunjukkan oleh individu dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar, khususnya pengaruh yang berasal dari lingkungan sosial atau lingkungan dalam bermasyarakat. Diperkirakan, keputusan untuk mematuhi peraturan perpajakan bagi individu yang tergolong sebagai wajib pajak dipengaruhi oleh iklim keorganisasian di perusahaan tempat individu tersebut bekerja.

Iklim keorganisasian yang positif akan mendukung wajib pajak orang pribadi dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meliputi adanya tunggakan pajak, ketepatan dalam menyampaikan SPT, pembayaran jumlah setoran pajak sesuai yang tertera pada SPT, dan lain sebagainya. Sebaliknya, iklim keorganisasian yang negatif akan mendukung wajib pajak orang pribadi untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan undang-undangan perpajakan. Vardi (2001) dalam Mutikasari (2007) secara empiris telah membuktikan bahwa iklim keorganisasian berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku *organizational misbehavior* (OMB). Lussier (2005:487) dalam Mutikasari (2007) menyebutkan bahwa pada umumnya terdapat 7 dimensi di dalam iklim keorganisasian yang biasanya diteliti, diantaranya yaitu: (1) struktur, (2) kewajiban, (3) imbalan, (4) keakraban, (5) dukungan, (6) identitas organisasi dan loyalitas, serta (7) risiko.

2.1.14 Penelitian Terdahulu

Para peneliti terdahulu telah banyak menggunakan model TPB dalam untuk mengetahui perilaku individu maupun kelompok. Penelitian oleh Bobek, dkk (2007) dilakukan dengan menerapkan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* mengenai alasan perilaku para wajib pajak yang lebih suka menggunakan *refund* (kelebihan pajak). Yang dimaksud dengan *refund* adalah jumlah pajak yang disetorkan oleh wajib pajak lebih besar daripada jumlah yang tertera di SPT. Responden adalah para siswa yang diminta untuk membuat email orang tua masing-masing dengan tujuan agar mereka dapat mengisikan data perpajakan orang tua yang bersangkutan. Hipotesis yang diterapkan ada 3 dengan variabel independen yaitu sikap, norma subyektif, dan persepsi wajib pajak tentang kemampuan mereka untuk mengendalikan pembayaran mereka. Sedangkan variabel dependen adalah keputusan pembayaran sementara wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayar pajak rela mengorbankan potensi pendapatan investasi untuk mendapatkan manfaat emosional dari penerimaan cek pengembalian dana serta untuk menghindari kekhawatiran dan ketidakpastian tagihan pajak yang tak terduga. Dengan demikian, *tax professional* dan pembuat kebijakan memiliki kesempatan untuk menginformasikan pembayar pajak untuk mendapatkan hasil yang sama tanpa mengurangi manfaat keuangan dari pembayaran pajak yang dilakukan.

Mutikasari (2007) melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan industri pengolahan yang berlokasi di kota Surabaya. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan menengah dan besar karena

biasanya perusahaan telah menganut sistem informasi formal dengan responden para tax professional yang ada di perusahaan tersebut. Variabel dependen yang digunakan berasal dari teori TPB, yaitu sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norms*), dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived control behavior*). Selain variabel tersebut, peneliti juga menambahkan variabel lain, diantaranya kewajiban moral, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan, iklim organisasi perusahaan yang masing-masing dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Hasilnya adalah semua factor tersebut secara signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan dan perilaku tidak patuh dari wajib pajak.

Veronica P. (2009) menganalisis faktor-faktor pemengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan (studi kasus pada perusahaan manufaktur di Semarang). Variabel yang digunakan adalah replikasi dari Mutikasari (2007) dengan variabel dependen sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norms*), dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived control behavior*) yang berasal dari model TPB. Selain itu ada variabel prediktor lain berupa kewajiban moral, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan, dan iklim organisasi perusahaan. Variabel perantara adalah niat berperilaku dan variabel independen yang digunakan adalah perilaku.

Miladia (2010) melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance* wajib pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang. Sikap, niat, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan, dan iklim keorganisasian

merupakan variabel dependen. Sedangkan variabel independen adalah kepatuhan pajak badan.

Bobek dan Hatfield (2003) melakukan penelitian mengenai TPB dan peran kewajiban moral dalam kepatuhan pajak. Di dalam penelitian ini wajib pajak yang dijadikan penelitian adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP). Pada hipotesis pertamanya, disebutkan bahwa variabel yang terkandung di dalam TPB yaitu sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norms*), dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived control behavior*) berhubungan positif dengan perilaku tidak patuh. Hipotesis kedua menyebutkan kewajiban moral mempengaruhi perilaku tidak patuh. Sedangkan hipotesis ketiga menyebutkan bahwa kewajiban moral mempengaruhi variabel yang terkandung di dalam TPB. Sampel penelitian terbagi ke dalam tiga sumber, yaitu, mahasiswa universitas, para orang tua dari siswa Sekolah Dasar, seta penduduk Florida dan Georgia yang dipilih secara acak. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa sikap (*attitude*) dan norma subyektif (*subjective norms*) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Sedangkan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived control behavior*) tidak signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Kewajiban moral menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Untuk hasil dari hipotesis terakhir menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengaruh kewajiban moral terhadap variabel-variabel di dalam TPB.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Variabel Penelitian	Hasil
Mutikasari (2007)	<p><i>Independent Variable:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak 2. Norma subyektif 3. Kewajiban moral 4. Kontrol berperilaku yang dipersepsikan 5. Persepsi tentang kondisi keuangan 6. Persepsi tentang fasilitas perusahaan 7. Persepsi tentang iklim organisasi <p><i>Intervening Variable:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niat <i>tax professional</i> berperilaku tidak patuh <p><i>Dependent Variable:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpatuhan pajak badan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat <i>Tax Professional</i> untuk Berperilaku Tidak Patuh 2. Norma Subyektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Niat <i>Tax Professional</i> untuk Berperilaku Tidak Patuh 3. Kewajiban Moral berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Niat <i>Tax Professional</i> untuk Berperilaku Tidak Patuh 4. Kontrol Keperilaku yang Dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat <i>Tax Professional</i> untuk Berperilaku Tidak Patuh 5. Kontrol Keperilaku yang Dipersepsikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketidakpatuhan Pajak Badan 6. Niat <i>Tax Professional</i> untuk Berperilaku Tidak Patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketidakpatuhan Pajak Badan 7. Persepsi tentang Kondisi Keuangan Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketidakpatuhan Pajak Badan 8. Persepsi tentang Fasilitas Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Ketidakpatuhan Pajak Badan 9. Persepsi tentang Iklim keorganisasian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketidakpatuhan Pajak Badan
Veronica P. (2009)	<p><i>Independent Variable:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak berpengaruh positif dan

	<p>ketidakpatuhan pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Norma subyektif 3. Kewajiban moral 4. Kontrol berperilaku yang dipersepsikan 5. Persepsi tentang iklim organisasi 6. Persepsi tentang fasilitas perusahaan 7. Persepsi tentang kondisi keuangan <p><i>Intervening Variable:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niat <i>tax professional</i> berperilaku tidak patuh <p><i>Dependent Variable:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpatuhan pajak badan 	<p>signifikan terhadap Niat <i>Tax Professional</i> untuk Berperilaku Tidak Patuh</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Norma Subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat <i>Tax Professional</i> untuk Berperilaku Tidak Patuh 3. Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat <i>Tax Professional</i> untuk Berperilaku Tidak Patuh 4. Kontrol Keperilaku yang Dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat <i>Tax Professional</i> untuk Berperilaku Tidak Patuh 5. Kontrol Keperilaku yang Dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketidakpatuhan Pajak Badan 6. Niat <i>Tax Professional</i> untuk Berperilaku Tidak Patuh berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketidakpatuhan Pajak Badan 7. Persepsi tentang Kondisi Keuangan Perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketidakpatuhan Pajak Badan 8. Persepsi tentang Fasilitas Perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketidakpatuhan Pajak Badan 9. Persepsi tentang Iklim keorganisasian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketidakpatuhan Pajak Badan
Miladia (2010)	<p><i>Independent Variable:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap terhadap kepatuhan pajak 2. Niat <i>tax professional</i> untuk berperilaku patuh 3. Kondisi keuangan 4. Fasilitas perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap <i>tax professional</i> terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak 2. Niat <i>tax professional</i> untuk berperilaku patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

	<p>5. Iklim organisasi</p> <p><i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan pajak badan</p>	<p>3. Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak</p> <p>4. Fasilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak</p> <p>5. Iklim organisasi perusahaan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak</p>
Harinurdin (2009)	<p><i>Independent Variable:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi kontrol perilaku 2. Persepsi tentang kondisi keuangan 3. Persepsi tentang fasilitas perusahaan 4. Persepsi tentang iklim organisasi <p><i>Dependent Variable:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niat <i>tax professional</i> berperilaku patuh 2. Kepatuhan pajak badan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 2. Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap niat 3. Kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. 4. Kondisi fasilitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak 5. Kondisi iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 6. Niat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak
Bobek dan Hatfield (2003)	<p><i>An Investigation of the Theory Planned Behavior and the Role Moral Obligation in Tax Compliance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model TPB, sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan secara positif mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan 2. Perasaan individu terbesar atas kewajiban moral sedikit mempengaruhi ketidakpatuhannya 3. Kewajiban moral tidak mempengaruhi dan tidak signifikan terhadap variabel-variabel TPB.
Bobek, dkk (2007)	<p><i>An Investigation of Why Taxpayers Prefer Refunds: A Theory of Planned Behavior Approach</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku pembayar pajak secara signifikan mempengaruhi keputusan pembayaran pajak sementara 2. Norma subyektif secara signifikan mempengaruhi

		keputusan pembayaran pajak sementara 3. Persepsi pembayar pajak atas kemampuan mereka untuk mengendalikan posisi pembayaran pajak sebelumnya tidak signifikan mempengaruhi keputusan pembayaran pajak sementara
--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini adalah mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Pati. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sikap, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, kewajiban moral, niat, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan, iklim keorganisasian, serta perilaku.. Untuk lebih jelasnya, variabel tersebut disajikan dalam gambar 2.1

Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berasal dari persepsi tentang evaluasi atau perasaan yang ditunjukkan individu sebagai melalui tindakan berupa menyampaikan SPT tepat waktu, melakukan penunggakan pajak, maupun melaporkan jumlah nominal perpajakan yang tidak sesuai SPT. Semakin besar sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, maka akan semakin membuat WPOP untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Norma subyektif adalah pandangan orang lain tentang tindakan yang ditunjukkan oleh individu. Apabila tindakan yang ditunjukkan positif, orang lain akan mendukung tindakan tersebut. Semakin besar norma subyektif yang

ditunjukkan orang lain, maka akan meningkatkan niat WPOP untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Kontrol berperilaku yang dipersepsikan merupakan kendali yang dimiliki oleh WPOP di dalam dirinya sendiri dalam menghadapi keinginan untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. Semakin tinggi kontrol berperilaku yang dipersepsikan, maka akan meningkatkan niat WPOP untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Kewajiban moral merupakan kesadaran yang dimiliki oleh tiap-tiap individu dan belum tentu dimiliki oleh orang lain. Misalnya, apabila seseorang melakukan kesalahan, maka akan terdapat rasa bersalah yang ada dalam dirinya. Semakin besar kewajiban moral yang dimiliki, maka akan mengurangi niat WPOP untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.

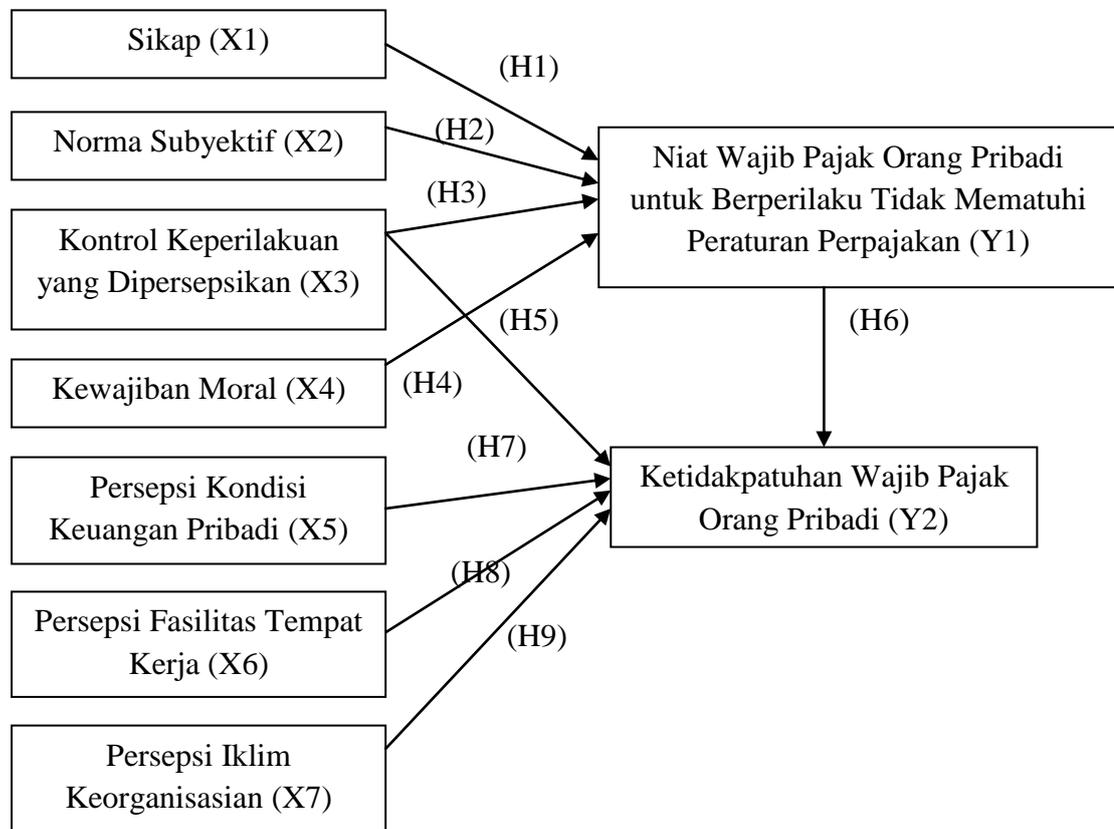
Niat WPOP untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan didasari oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Diantaranya adalah sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, dan kewajiban moral.

Persepsi tentang kondisi keuangan pribadi mencakup kemampuan yang dimiliki oleh individu sebagai WPOP dalam memenuhi semua tingkatan kebutuhannya, baik itu primer, sekunder, maupun tersier. Semakin baik persepsi kondisi keuangan pribadi, maka akan menurunkan ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Persepsi tentang fasilitas tempat kerja dapat mengurangi ketidakpastian yang dialami oleh WPOP serta dapat menjamin bahwa WPOP memiliki semua data yang dibutuhkan untuk membuat suatu pelaporan perpajakan yang lengkap

dan sesuai dengan prosedur. Semakin tinggi persepsi tentang fasilitas tempat kerja, maka akan menurunkan ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Persepsi tentang iklim kerganisasian dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan wajib pajak. Tujuh dimensi iklim keorganisasian adalah: (1) struktur, (2) kewajiban, (3) imbalan, (4) keakraban, (5) dukungan, (6) identitas organisasi dan loyalitas, serta (7) risiko. Semakin positif persepsi tentang iklim keorganisasian, maka akan menurunkan ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya (Usman dan Akbar, 2006). Hipotesis yang telah dilakukan pengujian, akan memberikan hasil hipotesis tersebut ditolak atau diterima. Berdasarkan landasan teori dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis yang akan diteliti merupakan replikasi dari Mutikasari (2007).

2.3.1 Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Niat Berperilaku

Sikap (*attitude*) merupakan sebuah evaluasi kepercayaan (*belief*) atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (Jogiyanto, 2007). Sikap seseorang terhadap suatu obyek berwujud perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan yang menunjukkan tidak mendukung atau tidak memihak terhadap sesuatu (*unfavorable*). Sikap terhadap peraturan perpajakan merupakan perasaan positif atau negatif yang ditunjukkan oleh WPOP terhadap peraturan perpajakan. Sikap positif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat mematuhi peraturan perpajakan. Sebaliknya, sikap negatif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000), dan Hanno & Violette (1996) dalam Mutikasari (2007) telah memanfaatkan model TPB untuk menjelaskan tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil temuan Bobek & Hatfield (2003), Hanno & Violette (1996), dan Mutikasari (2007) adalah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan

pajak. Di sisi lain, Blanthorne (2000) tidak dapat membuktikan pengaruh sikap terhadap ketidakpatuhan terhadap niat karena model pengukuran sikap tidak valid. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.

2.3.2 Pengaruh Norma Subyektif terhadap Niat Berperilaku

Norma subyektif (*subjective norms*) adalah persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1988 dalam Mutikasari, 2007). Pengaruh sosial tersebut dapat berasal dari lingkungan sekitar individu yang bersangkutan. Apabila orang lain menilai bahwa tidak mematuhi peraturan perpajakan merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan, maka individu akan cenderung berniat untuk mematuhi perpajakan.. Jackson dan Milliron (1986); Roth *et al* (1989), Syeenbergen, McGraw and Scholz (1992); Bobek & Hatfield (2003) dan Hanno & Violette (1996), serta Mutikasari (2007) meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dan menemukan bahwa teman sejawat memiliki pengaruh yang besar dalam memprediksi perilaku wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.

2.3.3 Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Niat Berperilaku

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) yang dimaksud adalah tingkat kendali atas diri wajib pajak dalam melakukan

suatu perilaku tertentu di bidang perpajakan. Misalnya melaporkan SPT dengan tepat atau tidak, melakukan penunggakan pajak, terlambat membayar, dan lain sebagainya. Apabila dalam diri setiap individu memiliki kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan sangat kuat, maka hal-hal seperti melanggar kewajiban perpajakan tidak akan terjadi. Karena di dalam dirinya sudah terdapat prinsip yang akan mempengaruhi niat berperilakunya. Individu yang memiliki kontrol berperilaku yang dipersepsikan positif, akan membuatnya untuk berniat mematuhi peraturan perpajakan. Sedangkan individu yang memiliki kontrol berperilaku yang dipersepsikan negatif akan membuatnya berniat untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Ajzen (2002) dalam Mutikasari (2007) meneliti bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi kepada individu tersebut dan niat akan terbentuk jika individu merasa dapat melakukan suatu perilaku. Mutikasari (2007) dapat membuktikan bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan cukup signifikan. Sedangkan Bobek & Hatfield (2003) dan Blanthorne (2000) dalam Mutikasari (2007) tidak dapat membuktikan bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan cukup signifikan dalam penelitiannya. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.

2.3.4 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Niat

Kewajiban moral merupakan variabel prediktor lain di luar model TPB yang merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun belum tentu

dimiliki oleh orang lain. Norma individu yang positif, akan berdampak pada niat individu yang selalu mematuhi peraturan perpajakan. Namun, bila norma yang dimiliki tersebut negatif, maka kepatuhan perpajakan tidak akan tercapai. Blanthorne (2000), Kaplan, Newbery & Reckers (1997), Hanno dan Violette (1996), serta Mutikasari (2007) telah membuktikan secara empiris bahwa kewajiban moral berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Kewajiban moral berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan.

2.3.5 Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Perilaku

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dapat mempengaruhi perilaku baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung akan muncul apabila terdapat *actual control* yang berada di luar kehendak individu (Ajzen, 1988 dalam Mutikasari, 2007). Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif dan semakin besar kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh seseorang, maka niat untuk memunculkan sebuah perilaku tertentu juga semakin besar. Sebaliknya, perilaku yang ditunjukkan oleh individu juga dapat berbeda dengan niat individu apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan. Mutikasari (2007) telah membuktikan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan secara signifikan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5: Kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.6 Pengaruh Niat Berperilaku terhadap Perilaku

Niat merupakan dasar dari sebuah perilaku, karena perilaku tidak akan terjadi tanpa adanya niat untuk berperilaku. Jika niat yang timbul itu untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan peraturan yang ada, maka akan menghasilkan perilaku yang benar dan tidak merugikan. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mutikasari (2007) sebelumnya, variabel ini diukur menggunakan dua indikator, yaitu kecenderungan dan keputusan. Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000), Hanno & Violette (1996), serta Mutikasari (2007) menemukan bahwa niat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H6: Niat untuk berperilaku tidak mematuhi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.7 Pengaruh Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi terhadap Kepatuhan Pajak

Apabila individu yang tergolong sebagai wajib pajak berhasil memenuhi semua tingkatan kebutuhan mulai dari primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk. Mutikasari (2007) membuktikan

persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam konteks wajib pajak badan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H7: Persepsi tentang kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.8 Pengaruh Persepsi Fasilitas Tempat Kerja terhadap Kepatuhan Pajak

Individu yang telah memiliki kelengkapan fasilitas dalam urusan perpajakan di tempat kerjanya cenderung melaporkan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga sebaliknya, bila fasilitas perpajakannya tidak lengkap, maka kewajiban perpajakan individu tersebut tidak akan terlaksana sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks wajib pajak badan, Mutikasari (2007) membuktikan bahwa persepsi tentang fasilitas perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H8: Persepsi tentang fasilitas tempat kerja berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.9 Pengaruh Persepsi Iklim Keorganisasian terhadap Perilaku

Perilaku individu sebagian besar dipengaruhi oleh keadaan lingkungan organisasi tempat ia bekerja. Iklim keorganisasian yang positif dimana semua anggota organisasi berperilaku sesuai dengan peraturan perpajakan, maka akan mendukung individu yang tergolong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sebaliknya, apabila iklim keorganisasiannya negatif yang menunjukkan bahwa semua anggota organisasi berperilaku

menyimpang dari peraturan perpajakan, maka akan mendorong wajib pajak yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh dapat dipastikan semakin tidak patuh. Penelitian yang dilakukan Mutikasari (2007) menemukan bahwa persepsi tentang iklim keorganisasian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H9: Persepsi tentang iklim keorganisasian berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai variabel penelitian dan operasional variabel yang mendeskripsikan variabel-variabel secara operasional, yaitu sampai dengan cara pengukurannya. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian yang menjelaskan siapa saja yang dijadikan responden untuk keperluan penelitian. Kemudian jenis dan sumber data, apakah menggunakan data primer atau sekunder, dilanjutkan dengan metode pengumpulan data, dan terakhir melakukan analisis data.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mutikasari (2007) yang menggunakan 9 variabel laten yang terdiri dari 7 variabel eksogen dan 2 variabel endogen. Variabel eksogen yang dilibatkan adalah sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norms*), kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*), kewajiban moral, persepsi kondisi keuangan pribadi, persepsi fasilitas tempat kerja, dan persepsi iklim keorganisasian. Sedangkan variabel endogen yang digunakan yaitu niat Wajib Pajak Orang Pribadi, serta ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.1.1 Sikap terhadap Ketidapatuhan Pajak

Sikap (*attitude*) dapat didefinisikan sebagai sebuah evaluasi kepercayaan (*belief*) atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, dimana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan sifatnya statis atau sulit untuk berubah. Dalam penelitian ini, data mengenai sikap terhadap ketidapatuhan pajak diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada masing-masing responden. Pengukuran variabel ini menggunakan skala angka 1 sampai dengan 7 yang menunjukkan kerangka penilaian-harapan (*valuation-expectancy framework*). Pernyataan awal yang diajukan untuk mengetahui *belief strength*. Untuk itu, responden penelitian akan ditanya tentang seberapa tinggi nilai yang diberikan oleh mereka terhadap “nilai (*value*)” dari setiap “keyakinan (*belief*)” dalam bentuk pertanyaan atau seberapa penting peran indikator tersebut dalam pengambilan keputusan untuk melakukan ketidapatuhan di bidang perpajakan. Pernyataan selanjutnya berhubungan dengan *outcome evaluation*, dimana responden harus menentukan “tingkat harapan (*rate of expectancy*)” dari masing-masing indikator mulai dari sangat dipertimbangkan sampai dengan sangat tidak dipertimbangkan dalam perilaku yang ditunjukkan oleh masing-masing responden. Jenis pernyataan dalam kuesioner penelitian ini mengacu pada penelitian Mutikasari (2007).

3.1.2 Norma Subyektif

Norma subyektif terhadap ketidakpatuhan pajak merupakan pandangan yang ditimbulkan oleh orang lain dalam lingkungan seseorang sebagai responden terhadap perilaku yang ditunjukkan berupa ketidakpatuhan perpajakan. Responden tersebut dapat terpengaruh atau tidak terhadap kondisi sosial di sekitarnya, tergantung pada kekuatan kepribadian yang dimilikinya. Apabila lingkungan sosial mendukung untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan, maka besar kemungkinan individu tersebut akan melakukan ketidakpatuhan pajak. Dalam penelitian ini, pernyataan pertama ada hubungannya dengan *normative beliefs*. Sedangkan pernyataan kedua berkaitan dengan *motivation to comply*. Jenis pernyataan dalam kuesioner penelitian ini mengacu pada penelitian Mutikasari (2007) dengan menggunakan skala 7 poin.

3.1.3 Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan

Kontrol berperilakuan yang dipersepsikan adalah kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu terhadap hambatan yang akan dialami dalam melakukan ketidakpatuhan pajak, diantaranya tidak membayar pajak tepat waktu, melakukan penunggakan, melaporkan jumlah pajak tidak sesuai dengan SPT, dan lain-lain. Pernyataan pertama digunakan untuk mengetahui *control belief strength*, sedangkan pernyataan yang kedua untuk mengetahui *control beliefs power*. Jenis pernyataan dalam kuesioner penelitian ini mengacu pada penelitian Mutikasari (2007) dan di dalam kuesioner menggunakan skala 7 poin.

3.1.4 Kewajiban Moral

Norma individu yang melekat pada diri setiap wajib pajak dan biasanya tidak dimiliki oleh orang lain dalam konteks perpajakan dapat disebut sebagai kewajiban moral. Di dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk kewajiban moral sesuai dengan penelitian Mutikasari (2007) serta jenis pernyataan di dalam kuesioner menggunakan skala 7 poin.

3.1.5 Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Berperilaku Tidak Patuh

Niat (*intention*) merupakan kecenderungan yang dialami oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam melakukan pengukuran terhadap variabel laten ini, responden akan diminta pendapatnya atas pernyataan yang diberikan. Pernyataan yang diberikan terkait dengan variabel niat untuk berperilaku tidak patuh ada 2 sesuai dengan penelitian Mutikasari (2007), yaitu: (1) kecenderungan dan (2) keputusan untuk bersikap patuh terhadap ketentuan perpajakan. Jenis pernyataan di dalam kuesioner menggunakan skala 7 poin.

3.1.6 Persepsi tentang Kondisi Keuangan Pribadi

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan

individu tersebut sangat buruk. Pernyataan yang diberikan terkait dengan variabel kondisi keuangan pribadi ada 2 dengan menggunakan skala 7 poin.

3.1.7 Persepsi tentang Fasilitas Perusahaan

Persepsi tentang fasilitas perusahaan merupakan pandangan dari individu yang termasuk sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengenai segala sumber daya yang ada di perusahaan tempat bekerja, dimana WPOP tersebut memiliki informasi keuangannya sendiri. Dalam variabel ini, data yang diperoleh menggunakan data primer dan skala 7 poin melalui pembagian kuesioner kepada responden penelitian. Pengukuran dalam variabel ini memodifikasi instrumen yang dikembangkan Bradley (1994) dan Siahaan (2005) dalam Mutikasari (2007) yang terdiri dari 3 pernyataan.

3.1.8 Persepsi tentang Iklim Keorganisasian

Persepsi tentang iklim keorganisasian merupakan persepsi mengenai kebijakan-kebijakan, praktik dan prosedur di dalam organisasi formal maupun informal (Reichers dan Schneiders, 1990) dalam Mutikasari (2007). Iklim keorganisasian dalam hal ini adalah persepsi dari WPOP yang merefleksikan harapan yang ada di dalam organisasi, rutinitas lingkungan kerja, serta perilaku kerja yang didukung dan dihargai oleh organisasi. Pengukuran yang digunakan dalam variabel ini menggunakan skala 7 poin hasil replikasi Mutikasari (2007).

3.1.9 Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan ketidapatuhan yang ditimbulkan dari individu yang termasuk dalam kategori wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Variabel ini menggunakan instrumen replikasi penelitian dari Brown dan Mazour (2003) dalam Mutikasari (2007) yang di dalamnya terdiri dari 3 variabel, yaitu: (1) kepatuhan dalam penyerahan SPT (*filling compliance*), (2) kepatuhan dalam hal pembayaran (*payment compliance*), dan (3) kepatuhan dalam pelaporan (*reporting compliance*).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang akan diamati berupa benda hidup maupun benda mati, dimana sifat-sifat yang ada di dalam obyek tersebut dapat diukur atau diamati (Yenselpischa, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang tergolong dalam Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sesuai dengan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang bekerja dan berdomisili di kabupaten Pati. Alasan pemilihan Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk menindaklanjuti penelitian terdahulu dalam meneliti kepatuhan pajak dengan subyek orang pribadi. Sedangkan alasan pemilihan kabupaten Pati, karena kabupaten tersebut mengalami peningkatan Upah Minimum Regional (UMR) selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah peningkatan UMR tersebut dikarenakan oleh kepatuhan wajib pajak di kabupaten Pati.

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi obyek dalam penelitian (Yenselpischa, 2008). Responden yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah WPOP yang bekerja di kabupaten Pati dengan kriteria: (1) telah

bekerja pada instansi yang terletak di kabupaten Pati minimal selama 1 tahun dan telah memiliki NPWP, dan (2) pernah mengisi SPT. Dalam analisis model *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan *Partial Least Square* (PLS), sampel minimal direkomendasikan berkisar dari 30-100 (Ghozali, 2011). Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menentukan sampel sebesar 100 responden. Hasil dari perolehan sampel tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan model *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan *Partial Least Square* (PLS).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang tergolong sebagai WPOP di kabupaten Pati.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, dimana data penelitian tersebut berwujud pendapat yang diberikan oleh responden, kemudian diolah lagi menjadi angka (kuantitatif) berdasarkan angka yang tertera di dalam skala pada kuesioner penelitian. Sedangkan berdasarkan sumber data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli secara langsung tanpa menggunakan perantara. Sumber langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Data tersebut diperoleh dari hasil kuesioner berupa pertanyaan yang dibagikan kepada responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan fakta mengenai variabel dalam penelitiannya (Azwar, 1997 dalam Miladia, 2010). Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah menyebar kuesioner untuk memperoleh fakta aktual tersebut yang isinya berupa beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh responden yang termasuk dalam WPOP di kabupaten Pati. Kuesioner dibagikan kepada beberapa instansi yang para pekerjanya memiliki NPWP, diantaranya pegawai yang bekerja di Pengadilan Negeri Pati; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; serta kantor kecamatan Tlogowungu untuk memperoleh 100 responden.

3.5 Metode Analisis Data

Alat analisis untuk menguji hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah analisis multivariat *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) yang merupakan alternatif dalam metode persamaan struktural.

Menurut Ghozali (2005), PLS merupakan metode analisis yang *powerful* karena tidak mengasumsikan data harus dalam skala pengukuran tertentu dan juga mengenai jumlah sampel relatif kecil. Software PLS digunakan pada penelitian ini karena semua variabel merupakan variabel laten, dan terdapat tiga model hipotesis bertingkat. Dalam pengujian digunakan software SmartPLS versi 2.0.

Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari 3 set hubungan, yaitu *inner model* yang berfungsi untuk menspesifikasi hubungan antara variabel laten (*structural model*), *outer model* yang menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya, serta *weight relation* untuk mengestimasi nilai kasus dari variabel laten.

3.5.1 Inner Model

Inner model (*inner relation*, *structural model* dan *substantive theory*) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif (Ghozali, 2011). Model persamannya adalah sebagai berikut:

$$\eta = \beta_0 + \beta \eta + \Gamma\xi + \zeta$$

dimana η menggambarkan vektor endogen (dependen) variabel laten, ξ adalah vektor variabel laten exogen, serta ζ merupakan vektor variabel residual.

Inner Model dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, Stone-GeisserQ-square test untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.

3.5.2 Outer Model

Outer model sering disebut juga *outer relation* atau *measurement model*, mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Blok indikator refleksif dapat ditulis dengan persamaan:

$$x = \Lambda_x \xi + \varepsilon_x$$

$$y = \Lambda_y \eta + \varepsilon_y$$

dimana x dan y adalah indikator atau manifest variabel untuk variabel laten eksogen dan endogen ξ dan η . Sedangkan Λ_x dan Λ_y merupakan matrik loading yang menggambarkan koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya. Residual yang diukur dengan ε_x dan ε_y dapat diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran (Ghozali, 2011). Sedangkan blok dengan menggunakan indikator formatif dapat ditulis persamaannya sebagai berikut:

$$\xi = \Pi_{\xi} x + \delta_{\xi}$$

$$\eta = \Pi_{\eta} y + \delta_{\eta}$$

dimana ξ , η , x , dan y sama dengan yang digunakan pada persamaan blok refleksif, sedangkan Π_x dan Π_y merupakan koefisien regresi berganda dari variabel laten dan blok indikator, δ_{ξ} dan δ_{η} adalah residual dari regresi (Ghozali, 2011). *Convergent validity* dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan

konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghazali, 2006).

Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah membandingkan nilai *square root of Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reabilitas *component score* variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan *composite reability*. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50 (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Ghazali, 2006). *Composite reability* yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *Cronbach's Alpha* (Ghozali, 2006).

3.5.3 Weight Relation

Inner dan *outer model* memberikan spesifikasi yang diikuti dalam estimasi algoritma PLS, oleh karena itu diperlukan definisi *weight relation*. Nilai kasus untuk setiap variabel laten diestimasi dalam PLS sebagai berikut:

$$\xi_b = \sum_{kb} W_{kb} X_{kb}$$

$$\eta_i = \sum_{ki} w_{ki} y_{ki}$$

dimana w_{kb} dan w_{ki} adalah k weight yang digunakan untuk membentuk estimasi variabel laten ξ_b dan η_i (Ghozali, 2011).